



MODUL

HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Agustina Wati, S.H., M.H.
Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Sholihin Bone, S.H., M.H.

MODUL
Semester Genap
2020/2021
HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Agustina Wati, S.H., M.H.
Poppilea Erwinta, S.H., M.H,
Sholihin Bone, S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2021

MODUL SEMESTER GENAP 2020/2021
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Copyright © Pustaka Ilmu, 2022

Hak cipta ada Pada Penulis

xIviii + 142 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-6225-51-6

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Agustina Wati, S.H., M.H.
Poppilea Erwinta, S.H., M.H,
Sholihin Bone, S.H.,M.H.

Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Desain Cover : Linkmed

Layout : Linkmed

MODUL SEMESTER GENAP 2020/2021
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diterbitkan (Cetakan 1) April 2022 oleh:

Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu Jl. Menur No. 187 Bantul,
Yk Telp. /WA: 0857 1285 3858

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Modul Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tahun ajaran 2020/2021 semester genap.

Modul mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini, merupakan pedoman bagi mahasiswa semester awal (semester 2), sebagai mata kuliah lanjutan dari proses belajar setelah lulus Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Modul ini, secara substansi berisi rincian/tahapan perkuliahan Hukum Administrasi Negara yang diberikan selama semester genap tahun ajaran 2021-2022. Pada setiap pertemuan, modul ini akan disampaikan sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk belajar lebih awal sebelum proses pembelajaran dimulai.

Metode dalam modul ini Hukum Administrasi Negara dengan cara *one way*, dan sebagian diberikan dengan metode *Problem Based Learning* yang terjadwal. Fungsi Modul ini untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari keseluruhan isi substansi dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara, sehingga harapannya mahasiswa membaca keseluruhan modul ini secara seksama.

Pada akhir, saya menyadari masih banyak kekurangan dari modul ini, untuk itu segala saran, kritik, masukan untuk

perbaiki modul ini. Terimakasih buat ayah Ibu yang selalu mendoakan dinda, sehat selalu. Suami yang mendorong terus untuk berkarya atas motivasi dan doa-doa nya.

Pada saat ini bangsa kita, menghadapi pandemi covid 19, dampak dalam pola belajar dilakukan melalui daring. Proses pembelajaran dengan daring melalui *zoom meeting*, sebagai pengganti tatap muka, berakibat pada pola pembelajaran bagi mahasiswa. Adaptasi dengan ilmu dan teknologi, baik dosen dan mahasiswa, juga mempengaruhi proses pembelajaran, dan inovasi-inovasi baru selama perkuliahan dengan media daring. Semoga pandemi ini cepat berlalu, dan dapat melakukan proses pembelajaran tatap muka antara dosen, mahasiswa, sehingga hasil dapat maksimal dalam penyampaian materi hukum administrasi negara.

Mahasiswa sebagai generasi Z, tentu sangat mudah mengakses informasi dan teknologi, dan beradaptasi teknologi. Proses pembelajaran daring, banyak tantangan dan harapan yang masih jauh sebagai bentuk proses pembelajaran tatap muka. Semoga modul ini, menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam memahami hukum administrasi negara.

Sebaik-baik manusia, adalah manusia yang di dalam hidupnya banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Modul ini sebagai iktiar saya untuk memberi manfaat bagi mahasiswa. Ilmu ini saya tabur semoga tumbuh subur dan manfaat” amiin.

Samarinda, 20 Januari 2022

DAFTAR ISI

• KATA PENGANTAR	iii
• DAFTAR ISI	v
• PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	xvi
• DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	xvii
• CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN MATA KULIAH...	xix
• METODE PEMBELAJARAN	xxi
1. Pengajaran (Dosen)	xxi
2. Tutorial	xxiii
• BERPERILAKU DAN INTEGRITAS AKADEMIK	xxvii
1. Berperilaku	xxvii
2. Penggunaan Alat Komunikasi	xxviii
3. Penggunaan Laptop	xxviii
4. Integritas Akademik	xxviii
• PENILIAN	xxix
• SUMBER BELAJAR	xxxii
• JADWAL	xIvii

MODUL 1 DAN 2 KONSEP NEGARA HUKUM	35
A. Latar Belakang Mempelajari Konsep Negara Hukum	35
B. Tujuan Negara Hukum	35
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Pertama dan Kedua	35
D. Penilaian Perkuliahan Pertama dan Kedua	35
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Pertama	35
1. Sejarah Hukum Administrasi Negara	1
2. Pengertian Negara Hukum	2
3. Pengertian Hukum Administrasi Negara	3
4. Tugas-Tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern	4
5. Perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia	5
Tugas Individu	6
MODUL 3 DAN 4 SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	7
A. Latar Belakang Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara	7
B. Tujuan Belajar Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara	7
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Ketiga dan Keempat	7
D. Penilaian Perkuliahan Ketiga dan Keempat	7
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Ketiga dan Keempat	7

1. Kedudukan Hukum Administrasi Negara	7
2. Hubungan Hukum Antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.....	8
3. Macam-Macam Sumber Hukum Administrasi Negara	8
4. Subyek Hukum Administrasi Negara	10
5. Hak, Kewajiban, dan Fungsi Badan dan/Pejabat Pemerintah	10
MODUL 5 DAN 6 KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN	14
A. Tujuan Belajar Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan	14
B. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kelima dan Keenam	14
C. Penilaian Perkuliahan Kelima dan Keenam	14
D. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kelima dan Keenam	14
1. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik	14
2. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Privat	14
3. Sistem Penyelenggara Pemerintahan dan Penyelenggara Negara	15
4. Kewenangan Pemerintahan dalam Administrasi Pemerintahan	16
Tugas Individu	22
MODUL 7 DAN 8 TINDAKAN PEMERINTAHAN	23

A. Latar Belakang Tindakan Pemerintah	23
B. Tujuan Belajar Tindakan Pemerintah	23
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Ketujuh dan Kedelapan	23
D. Penilaian Perkuliahan Ketujuh dan Kedelapan	23
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Ketujuh dan Kedelapan	23
1. Konsep Dasar Tindakan Pemerintah	23
2. Istilah Tindakan Pemerintah	23
3. Unsur-Unsur Tindakan Pemerintah	24
4. Syarat Untuk Keabsahan Tindakan Pemerintah	25
5. Karakteristik Tindakan Pemerintah	25
Tugas Individu	26
MODUL 9 DAN 10 INSTRUMEN	
PEMERINTAHAN	27
A. Latar Belakang Instrumen Pemerintahan	27
B. Tujuan Belajar Instrumen Pemerintahan	27
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kesembilan dan Kesepuluh	27
D. Penilaian Perkuliahan Kesembilan dan Kesepuluh	27
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kesembilan dan Kesepuluh	27
1. Konsep Dasar Instrumen Pemerintahan	27
2. Peraturan Perundang-Undangan	28
3. Keputusan Tata Usaha Negara	29

4. Instrumen Hukum Keperdataan	32
5. Konsensi Pemerintahan	33
Tugas Individu	34

MODUL 11 DAN 12 DISKRESI

PEMERINTAHAN	35
A. Latar Belakang Diskresi Pemerintahan	35
B. Tujuan Belajar Diskresi Pemerintahan	35
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kesebelas dan Kedua belas	35
D. Penilaian Perkuliahan Kesebelas dan Keduabelas	35
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kesebelas dan Kedua belas	35
1. Konsep Dasar Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	35
2. Ruang Lingkup Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	36
3. Persyaratan Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	36
4. Prosedur Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	37
5. Akibat Hukum Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	38
Tugas Individu	39

MODUL 13 DAN 14 ASAS-ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)	40
A. Latar Belakang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	40
B. Tujuan belajar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	40

C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Ketiga Belas dan Keempat Belas	40
D. Penilaian Perkuliahan Ketiga Belas dan Keempat Belas	40
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Ketiga Belas dan Keempat Belas	
1. Konsep Dasar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	40
2. Sejarah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	41
3. Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	42
4. Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	44
5. AUPB sebagai dasar Kewenangan Pejabat ...	46
6. Perkembangan Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Belanda	46
Tugas Individu	47
MODUL 15 UJIAN TENGAH SEMESTER	48
Bahan berupa soal dan jawaban dengan uraian sesuai yang diajarkan dari Modul Pertama Sampai Modul Keempat Belas	
MODUL 16 DAN 17 APARATUR SIPIL NEGARA	49
A. Latar Belakang Aparatur Sipil Negara	49
B. Tujuan Belajar Aparatur Sipil Negara	49

C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Keenam Belas dan Ketujuh Belas	49
D. Penilaian Perkuliahan Keenam Belas dan Ketujuh Belas	49
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Keenam Belas dan Ketujuh Belas	49
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara	49
2. Pengaturan Aparatur Sipil Negara	52
3. Kedudukan Aparatur Sipil Negara	55
4. Hak, Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara .	57
5. Manajemen Pegawai Negeri Sipil	58
MODUL 18 DAN 19 SISTEM	
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI	
PEMERINTAHAN	60
A. Latar Belakang Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	60
B. Tujuan Belajar Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	60
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kedelapan Belas dan Kesembilan Belas	60
D. Penilaian Perkuliahan Kedelapan Belas dan Kesembilan Belas	60
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kedelapan Belas dan Kesembilan Belas	60
1. Konsep Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	60
2. Pelaksana Badan dan/Atau Pejabat Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	61
3. Bantuan Kedinasan	62

4. Keputusan Berbentuk Elektronik	63
5. Izin, Dispensasi, dan Konsensi	64
6. Prosedur Administrasi Pemeritahan	66
MODUL 20 DAN 21 KEPUTUSAN	
PEMERINTAHAN	75
A. Latar Belakang Keputusan Pemerintahan	75
B. Tujuan Belajar Keputusan Pemerintahan	75
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kedua Puluh dan Kedua Puluh Satu	75
D. Penilaian Perkuliahan Kedua Puluh dan Kedua Puluh Satu	75
E. Kegiatan dalam Perkuliahan Kedua Puluh dan Kedua Puluh Satu	75
1. Konsep Keputusan Pemerintah	75
2. Syarat Sahnya Keputusan	77
3. Berlaku dan Mengikat Keputusan Pemerintah	78
4. Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan	80
5. Akibat Hukum Keputusan yang Dapat Dibatalkan	83
6. Legalisasi Dokumen	83
MODUL 22 DAN 23 MALADMINISTRASI	84
A. Latar Belakang Maladministrasi	84
B. Tujuan Belajar Maladministrasi	84
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Kedua Puluh Dua dan Kedua Puluh Tiga	84

D. Penilaian Perkuliahan Kedua Puluh Dua dan Kedua Puluh Tiga	84
E. Kegiatan Dalam Kedua Puluh Dua dan Kedua Puluh Tiga	84
1. Konsep Dasar Maladministrasi	84
2. Bentuk-Bentuk Maladministrasi	84
3. Pengaturan Maladministrasi	85
4. Lembaga Ombudsman RI Sebagai Pengawas Maladmintrasi	86
5. Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	87
6. Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus Dalam Maladministrasi	87
MODUL 24 DAN 25 PENGAWASAN	89
A. Latar Belakang Pengawasan	89
B. Tujuan Belajar Pengawasan	89
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Keduapuluh Empat dan Kedua Puluh Lima	89
D. Penilaian Perkuliahan Keduapuluh Empat dan Kedua Puluh Lima	89
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Keduapuluh Empat dan Kedua Puluh Lima	89
1. Konsep Dasar Pengawasan	89
2. Jenis-Jenis Pengawasan	90
3. Obyek dan Pelaksanaan Pengawasan	91
4. Sistem Pengawasan Disiplin Pegawai	92
5. Pengawasan dan Pembinaan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Daerah	93
Tugas Individu	96

MODUL 26 DAN 27 UPAYA ADMINISTRASI	97
A. Latar Belakang Upaya Administrasi	97
B. Tujuan Belajar Upaya Administrasi	97
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Keduapuluh Enam dan Kedua Puluh Tujuh	97
D. Penilaian Perkuliahan Keduapuluh Enam dan Keduapuluh Tujuh	97
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Keduapuluh Enam dan Kedua Puluh Tujuh	97
1. Konsep Dasar Upaya Administrasi	97
2. Keberatan	98
3. Banding	99
4. Penyelesaian Sengketa Upaya Administrasi Menurut UU PTUN	100
5. Perkembangan Upaya Administrasi Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja	100
Tugas Individu	101
MODUL 28 DAN 29 SANKSI ADMINISTRASI .	102
A. Latar Belakang Sanksi Administrasi	102
B. Tujuan Belajar Sanksi Administrasi	102
C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Keduapuluh Delapan dan Keduapuluh Sembilan	102
D. Penilaian Perkuliahan Keduapuluh Delapan dan Kedua Puluh Sembilan	102
E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Kedua Puluh Delapan dan Kedua Puluh Sembilan	102
1. Konsep Dasar Sanksi Administrasi	102

2. Macam-Macam Sanksi Administrasi	103
3. Pejabat Yang Berwenang dalam Pengerakan Sanksi Administrasi	104
4. Tata Cara Sanksi Administrasi Pejabat Pemerintahan.....	105
5. Pengerakan Sanksi Administrasi	107
6. Penyampaian Keputusan Sanksi Administrasi	107
MODUL 30 UJIAN SEMESTER	108
Bahan Dari Modul Enam Belas Sampai Dua Puluh Sembilan	
• BIODATA PENULIS	109

PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH

Mata Kuliah AdministrasI Negara terbagi atas 5 (lima) Kelas, dengan 4 (empat dosen) yang mengajar perkelas masing-masing. Penanggung jawab Mata Kuliah: Dr. Siti Kotijah S.H. M.H

Dengan Pembagian Kelas:

Kelas A : Dr. Siti Kotijah S.H., M.H. dan Solikin Bone S.H., M.H

Kelas B : Agustiwati, S.H., M.H. dan Popilea Erwinta S.H., M.H.

Kelas C : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., dan Solikin Bone S.H., M.H

Kelas D : Agustiwati, S.H., M.H. dan Popilea Erwinta S.H., M.H.

Kelas E : Dr. Siti Kotijah S.H., M.H. dan Solikin Bone S.H., M.H

MODUL 1 DAN 2

KONSEP NEGARA HUKUM

A. Latar Belakang Mempelajari Konsep Negara Hukum

B. Tujuan Negara Hukum

C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Pertama dan Kedua

D. Penilaian Perkuliahan Pertama Dan Kedua

E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Pertama

1. Sejarah Hukum Administrasi Negara

Sejarah Hukum Administrasi Negara, di awal saat di bawah jajahan Pemerintah Hindia Belanda yang menerapkan hukum barat di tanah jajahan, dan setelah merdeka pemerintah Indonesia menerapkan asas konkrodasi, hukum-hukum peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku di wilayah Indonesia, selama negara belum membuat ketentuan peraturan perundang-undangannya yang baru.

Hukum Administrasi Negara, pertama sebagai bagian Hukum Tata Negara, dan perkembangannya diajarkan terpisah di semua Fakultas Hukum. Penggunaan istilah hukum administrasi negara bermacam-macam, dan pengertian lain penyebutan sudah banyak diuraikan dalam sudut pandang

para ahli terkait hal tersebut.¹ Dalam buku ajar ini, disebutkan dengan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan pedoman mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

2. Pengertian Negara Hukum

Dalam ensiklopedia Indonesia, istilah negara hukum (*rectstaat*) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (*machtstaat*) dirumuskan:² “Negara hukum (*rechtstaat*), negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yaitu tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan, agar semuanya berjalan menurut hukum.”

Menurut D. Muntiaras mendefinisikan negara hukum sebagai berikut:³

“Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk,

¹ Lihat Siti Kotijah, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Bab Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, MFA: Yogyakarta. hlm 76.

² Jumars Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan layanan Publik*, Nuasa Cendikia: Bandung, hlm, 24.

³ D. Muntiaras, 1999, *Tata Hukum Umum*, Pustaka Islam: Jakarta, hlm.20.

dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Secara historis dan praktis, konsep negara hukum, dalam bentuk beberapa modal sudah dijelaskan.

Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 Amadamen ketiga yaitu:

1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik;
2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; dan
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

3. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Pengertian Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai pemerintah di dalam kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai administrator negara. Hukum administrasi negara secara sempit pada prinsipnya adalah hukum administrasi negara saja.⁴ Hukum Administrasi Negara secara luas adalah hukum mengenai penyelenggaraan apa saja yang mengandung aspek kebijakan pemerintahan dan hukum publik. Tugas dan tanggung jawab pemerintah pada dasarnya pada permasalahan antara lain:⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

- a. Pemerintahan;
- b. Tata usaha negara;
- c. Pengurusan rumah tangga negara;
- d. Pembangunan; dan
- e. Pelestarian lingkungan hidup.

Ada tiga (3) kata arti administrasi negara, yakni:

- a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai individu politik (ketatanegaran);
- b. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintahan yakni sebagai kegiatan pemerintahan operasional; dan
- c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang

4. Tugas-Tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern

Pemerintah suatu negara modern mempunyai 5 (lima) fungsi yaitu:

1. Mengembangkan dan menegakkan persatuan nasional dan teritorial;
2. Mengembangkan kebudayaan nasional yang seserasi-seserasinya di atas semua kebudayaan suku, regional, daerah, dan sebagainya, agar terdapat kehidupan bangsa dan masyarakat yang rukun, sejahtera, dan makmur;
3. Pemerintahan yang tugas menegakan wibawa dan kekuasaan negara, yang kegiatan berupa peraturan

- perundang-undangann, pembinaan masyarakat negara, kepolisian, dan peradilan;
4. Administrasi negara, tugas dan kegiatan berupa melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi, policy), serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi), menyelenggarakan undang-undang (sesuai peraturan perundang-undangan); dan
 5. Bisnis (niaga), adalah kegiatan yang teratur (*terognized*) dan kontinu melayani kebutuhan-kebutuhan umum atau kebutuhan masyarakat sambil menciptakan dan memperoleh pendapatan (*income revenue*).⁶

5. Perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia

Hukum Administasi Negara berkembang dan menjadi ilmu sendiri sebagai mata kuliah dasar pada ilmu hukum. Hukum Administrasi Negara mengalami perubahan signifikan dengan diundangkan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah disingkat (UU AP). UU AP dapat dikatakan sebagai hukum materil dari Hukum Administrasi Negara. UU AP secara subtansi Hukum Administrasi Negara secara jelas standar, memberi pedoman sebagai dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintah dan warga masyarakat dalam adminsitrasi pemerintahan.

⁶ S. Prajudi Atmosudurjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 12.

Dalam perkembangannya penyelenggaraan administrasi pemerintahan ini, secara Hukum Administrasi Negara mengadopsi *des Bundes* (UU Prosedur Administrasi Negara Federal Jerman).⁷ Prakteknya penyelenggaraan negara tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggaraan pemerintahan itu, semua bermuara pada hukum. Kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukan tanpa persyaratan. Semua bermuara pada asas legalisasi atau aturan hukum (ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)).

Tugas Individu

- a) Dalam modul 1 dan 2, ada sub bahasan, silakan kembangkan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pokok bahasan dengan mendownload modul 1 sebanyak 5 (lima) jurnal dan modul 2 sebanyak 5 (lima) jurnal, setelah anda buat ringkasan setiap jurnal 1 (satu) halaman, atau maksimal 3 (tiga) halaman; dan
- b) Dari download jurnal itu, yang tidak anda mengerti, dan pahami, silakan buat 2 (dua) pertanyaan dan 2 (dua) jawaban.

⁷ Negara yang sudah menerapkan seperti UU AP, Spanyol dengan *Azcarate* sejak 1889, Austria memiliki *Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz* (1921), Amerika Serikat, *Administrative Procedure Act* (1946), Italia, *Administrative Code* (1990), dan Belanda dengan *Administratief Wet Bestuursrecht* (AWB)

BIODATA PENULIS



Nama : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Suami : Evans Sofanus S.E., S.T.
Orangtua : Ibu Yasitin Dan Bapak Ja'es
Saudara : Zainul Aripin S.H., M.Kn.
Wiwin Erna Ida Wati, S.H
Eli Fita, S. Sos.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman Samarinda
Email : skkotijah8@gmail.com/sitikotijah@ fh.
unmul.com.

Riwayat Pendidikan

- a. SD N 1 Desa Senden Kecamatan Peterongan.
- b. SMP N1 Negeri Peterongan, 1990
- c. SMA PRGI 1 Jombang, 1993

- d. Sarjana : S1 Fakultas Hukum Universitas Mataram, 1997
- e. Magister : S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2009
- f. Doktor : S3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015.

Jabatan Pernah Dipegang

- 1. Ketua Bidang Kapasitas Sumber Daya Manusia di Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah (Pulitbangwil) LP2M Universitas Mulawarman, Tahun 2009-2012.
- 2. Bidang Hukum Pada Pengawas Komisi Reklamasi dan Pascatambang Kalimantan Timur, tahun 2016-2018.
- 3. Sebagai Staff Ahli Hukum di Bidang Akademik di Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur, tahun 2019-2020.

Karya Ilmiah Penelitian dalam Studi

- 1. Skripsi, *Peranan Parivisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tingkat II Lombok Barat*, 1997.
- 2. Tesis, *Implementasi Prinsip-Prinsip Kebutuhan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan*, 2009,
- 3. Desertasi, *Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pertambangan Batubara*, 2015.

Pengalaman Penelitian

1. Upaya Pemberantasan Terhadap Aktifitas Ilegal Logging Ditinjau dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kalimantan Timur, 2006
2. *Tinjauan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Terhadap Permasalahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Untuk Pertambangan*, 2007.
3. *Disign Principle For Collaborative Forest Governance In Accordance With Local Characteristics, Changes in Forest Policy Indonesian Since 2005 to 2007*, The Universitas of Tokyo and CSF Unmul; CSF Unmul.
4. *Peran Pendamping Dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Poltabes Samarinda*, Lemlit Unmul 2007.
5. *Upaya Pemberantasan Terhadap Aktivitas Illegal Logging Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kalimantan Timur*, Lemlit Unmul, 2007.
6. *Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Batubara di Kukar Kaltim (Tim)*, April 2007, Dosen Muda Dikti/ Lemlit Unmul.
7. *Kajian Tentang Pengaruh Narkoba Terhadap Kehidupan Para Pelajar SLTP/SLTA di Kabupaten Kutai Kertanegara*; Agustus 2009, Puslibangwil Unmul dan Balitbanda Kukar.

8. *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pinjaman Lunak UKM Di Kabupaten Berau (Tim)*, November 2009 LPPM Unmul dan Balitbanda Berau.
9. *Reperda Penetapan Tarif PDAM Di Kabupaten Kutim, (Tim)* 2009, LPPM dan PDAM Kutim.
10. *Pengembangan Rencana Kawasan Perbatasan di Kabupaten Malinau, 2009*, Puslibanwil Unmul dan Balitbanda Malinua (Tim).
11. *Perencanaan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kukar (Tim)*, Desember 2009, Puslibangwil Unmul dengan Lemlit unmul, 12 oktober 2009.
12. *Penyusunan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kabupaten Kutai barat (Tim)*, juli 2009, Puslitbawil Unmul dengan Pembangunan Sekretariat Daerah Kubar.
13. *Kajian Pemakaran Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, 7 Oktober 2009*, Puslibangwil Unmul dan Pemerintah Kabupaten Paser.
14. *Penguasaan Sumber Daya Hutan Oleh Negara Di Tinjau UU No.41 Tahun 1999 jo UU No19 Tahun 2004 tentang Kebutuhan*, (Balitbanda Kukar, April 2010).
15. *Kegiatan Penyusunan, DPPL jalan dan jembatan Kabupaten Nunukan*, 4 November 2009, Puslibangwil dengan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Nunukan.
16. *Aspek Hukum Penetapan Kawasan Lindung Untuk Pertambangan di Tinjau dari UU No.19 Tahun 2004*, Fakultas Hukum, 2010.

17. *Penelitian Pembangunan Kebijakan bidang ekonomi dan kemasyarakatan Kota di Samarinda*, (tim) Puslitbawil, Juni 2010.;
18. *Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Nunukan* (tim); September 2010;
19. *Studi tentang Permasalahan Tanah Adat dan Tanah Ulayat di Wilayah* (tim) Kukar 2010;
20. *Studi Pengembangan wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kertanegara*, (Tim) Puslitbangwil, Desember 2010;
21. *Penyusunan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Kabupaten Kutai Kertanegara*, April 2011, Seketrian Kabupaten Kukar dan Puslitbangwil.
22. *Penyusunan Perencanaan Optimalisasi Pasar Tradisional Di Propinsi Kaltim, dinunukan, Januari 2012*, Lemlit Unmul dan Puslitbangwil.
23. *Perencanaan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, Februari 2012, Balitbanda Kabupaten Bulungan dan Puslitbangwil;
24. *Kajian teknis penguatan daya saing industry kecil dan menengah di Kaltim*, Lemlit, dan Pustabangwil Unmul, 2012.

Jurnal Ilmiah

1. *Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur*. Jurnal Hukum

- Vol.2, No.2 ISSN:0216-969X, hal:105-111, Desember 2006.
2. *Penegakan Hukum dalam Rangka Pemberantasan Praktek Ilegal logging di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol.2, No. 1 ISSN:0216-969X, hal:105-111, Desember 2006.
 3. *Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Ilmiah Mahakam, Vol.7, No.1, ISSN 1412-6885, Edisi Juni 2008.
 4. *Penguasaan Sumber Daya Hutan oleh Negara di Tinjau UU. No.41 tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004 Tentang Kebutuhan*, Bulletin Gerbang Balitbangdaku, Vol.V, No.13, ISNN 1907-3836, Edisi April 2010).
 5. *Hilangnya Megadiversity Di Kalimantan Timur*, Bulletin Gerbang Balitbangdaku, Vol.V, No.14 ISNN 1907-3836, Edisi Oktober 2010).
 6. *Pengaruh narkoba terhadap kehidupan para pelajar SLTP dan SLTA di Wilayah kabupaten Kutai Kertanegara*, Gerbang Etam, Jurnal penelitian dan pengembangan daerah, ISSN 197-838x, vol.4 no.1 tahun 2010.
 7. *Implementasi Prinsip-Prinsip Kebutuhan Dalam Rangka Konseversi Kebutuhan*, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Program Pasca sarjana program studi magister ilmu hukum universitas Wisnuwardhan, Volume 1 No. 2 Oktober 2010.
 8. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berdampak Lingkungan Dalam Hubungan Antar Bangsa*, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Program Pasca sarjana program studi magister

- ilmu hukum universitas Wisnuwardhana, Volume 2 No. 2 Oktober 2011;
9. *Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda*, dijurnal Yuridika, Vol.27, No.1, Januari-April 2012 ISSN 0215-849X (Januari-April 2012)
 10. *Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara*, Jurnal Yuridika, Vol.26 No.3, September-Desmbe 2011, ISSN 0215-849X (September-Desember 2011).
 11. *Islam Dan Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan*, Jurnal Yuridika, Vol.26 No.2, September-Desmber 2011, ISSN 0215-849X (Mei-Agustus 2011).
 12. *Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan: Essensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Jurnal Juridika, Vol.26 No.1, Januari-April 2011, ISSN 0215-849X (Januari-April 2011).
 13. *Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Gender dalam Kebijakan Tambang*, Jurnal Hukum Lingkungan Universitas Indonesia, Edisi Bahasa Indonesia, Akaditasi Dikti 980.270.99.000012. Volume 36 XVII-2012/26 September 2012.
 14. *Hak Masyarakat atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat (Society Rights of A Fine And Healty Environment)*, Risalah

- Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol.9, No.1, Juni 2013, ISSN 0216-969X (I Juni 2013)
15. *Kajian Islam dalam masalah Lingkungan Hidup di Kota Samarinda (Islam: Studes Regarding to Environmental in Samarinda City)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol.9, No.1, Juni 2013, ISSN 0216-969X (I Juni 2013)
 16. *Advancing Corporate Social Responsibility of Mining Enterprises at East Kalimantan to Attain Sustainable Environment*, ADRI, Internasional Journal of Scientific Conference and Call For Papers, Vol.1 No.1, Januari 2018, E-ISSN: 2615-3149.
 17. *Preventive Regulations to Remove Environmental to Mangrove Ecosystem at East Kalimantan, Indonesia*. Di Internasional Journal of Reseach in Law, Ekonomic and Social Sciences, Vol.1 I Juni 2019, E. ISSN 2656-2723, P-ISSN 2656-2731,
Doi:<http://doi.org/10.32501/INJURILESS.V1I1T52> (I Juni 2019)
 18. *Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat (studi di [polres kutai timur) (1 juni 2019)*, Jurnal Mulrev, valume 1 issue No.1 tahun 2019.
 19. *Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (Stegostoma Fasciatum) Dari Aktifitas Illegal Fishing*, Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Fakultas Hukum Unmul, Edisi 1, Volume 1. Maret 2021
 20. *Oil Refinery Dan Mitigasi Resiko Perubahan Iklim: Studi Kritis Terhadap Pembangunan Kilang Minyak di Kota*

Bontang, Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Fakultas Hukum Unmul, Edisi 1, Volume 1. Maret 2021

Procedding/Call Paper

1. *Hak Atas Perempuan Di Samarinda*, Pertemuan Komisi Nasional Perempuan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Jakarta
2. *Tata Kelola SDA Yang Mengakibat Dampak Lingkungan Dalam Hubungan Antar Bangsa*, Proceeding Seminar on Humanitarian Action Studies 2011, building peace through the improvement of humanitarian diplomacy, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta October 12, 2011. (12 Oktober 2011)
3. *Kajian Islam Dalam Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda*, Konferensi Antarbangsa Islam Borneo IV, 26-27 Oktober 2011 Unmul Samarinda;
4. *Penyelesaian Sengketa Bidang Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama Sebagai Upaya Menegakkan Sistem Syariah*, Konferensi Antarbangsa Islam Borneo 26-26 Juni 2012, Brunai Darusalam;
5. *Perlindungan Hukum Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Konteks Perempuan dan Kebijakan Pertambangan di Kota Samarinda Kalimantan Timur*, Proceeding Internasional Gender Conference 2012 (IGC 2012): Gender and

- Development Issues and Challenges Universiti Teknologi MARA Malaysia (2012)
6. *Kajian Filsafat Hukum Hak Penambangan*, Konferensi Nasional ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Melampaui perdebatan positivisme hukum dan teori hukum kodrat' Surabaya, 27-28 Agustus 2013 (2013)
 7. *The Liability of Regional Administrative of Samarinda Due to the Environmental Impact of the Coal Mining Business Activity in Samarinda*, Internasional Conference on Forestry and Mining, 10-12 Desember 2013 Hasanuddin University Makasar;
 8. *Ratio Decidendi of The Supreme Court Verdict Number 1400/K/Pdt/1986 about Interfaith Marriage in Islamic Law Perspective Reviving and strengthening Islamic Law as a Living Law Within World's Legal System*, 3rd Intenasional Conference on Islamic Law in Indonesia, Septembe 4-6 2018, At Faculty of Law Mulawaman Univesity, Samainda (2018)
 9. *The Criteria for Standard Damage to Seagrasses in The Perspective Of Environmental Law*, The 3rd Internasiona Seminar the Natural Resources Law for People's Welfare, 11-13 November 2018, Faculty of Law, University Jambi Indonesia (2018)
 10. *Genetic Quality Standard Appropriate with The Development of Science and Teknologigal In The Perspektive Of Environmental Law*, Internasional conference on tropical agrifood, feed and fuel (ICTAFF), Mesra Businnes 7 Resort Hotel Samarinda, 13-14th, 2018 (2018);

11. *Advancing Corporate Social Responsibility of Mining Enterprises at East Kalimantan to Attain Sustainable Environment*, Internasional Conference and Call Paper 16th ADRI, Samarinda.
12. *Criteria for Damage to Peat Ecosystems in the Environmental Law Perspective*, Internasional Conference on Tropical Studies and Its Application. 18 September 2018, Balikpapan;
13. *Criteria for Damaga to Karst in the Environmental Law Perspective*, The 1 Internastional Syamposium on Tropical Forestry and Environmental Sciences (ISTFES 2018), Faculty of Forestry Mularman, 3-4 Oktober 2018, Samarinda.
14. *Kriteria Kerusakan Terumbu Karang Dalam Perspektip Hukum Lingkunga*, Call for Papers Seminar Nasional (HA-PSL-IPB), 1 November 2018.
15. *Implications of Perda 8 of 2013 on the Organizærs of Reclamation and post-mining in Coal Mining in East Kalimantan*, Call for Paper, The Role of New, Renewable & Clear Energy in Achieving SDG7: Policy, Investment, & Technologoy, 26 April 2019, Jakarta.
16. *Perlindungan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja migran pada Sektor Pertambangan*, Proceeding Seminar Huum (SHN), Ende 2 Mei, 2019, Nusa Tenggara Timur.
17. *Kebenaran Dalam Mendapat Keadilan Yang Proposional Pada Penjatuhan Pidana Korupsi di Era Post Truth*, Call Paper Seri

Filsafat Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post Truth. Lombok, Mei 2019

Poster

Poster Internasional Workshop" Disaster risk reduction and climate change adaptation in the perspektive of education for sustainable development: challenges and opportunities in the Asia Pasific Region" The Asia 5th Asia Pasific RCE-ESD Meeting Le Grandeur Hotel Balipapan, July 16-18, 2012 Indonesia. Environmental Law's Protection for The Victim of Post Mining Activity Samarinda (2012)

Hak Cipta

1. Hak Cipta Buku Pengantar Hukum Indonesia, 22 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100466
2. Hak Cipta Buku Perbandingan Sistem Hukum, 31 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100919
3. Hak Cipta Buku Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat; Sebuah Gagasan Dari permasalahan petambangan batubara, 31 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100917
4. Hak Cipta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 31 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100918
5. Hak Cipta Buku Pengantar Baku Mutu Bioteknologi, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000133560
6. Hak Cipta Buku Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000133561

7. Hak Cipta Buku Ajar Hukum Kehutanan, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000144108
8. Hak Cipta Buku Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000132228
9. Hak Cipta Buku Duh...., Ruas-Ruas Hukum Kehutanan, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000144051
10. Hak Cipta Buku Kontruksi Hukum Administrasi Pemerintahan, 19 Juni 2019, Nomor Pencatatan 000144050
11. Hak Cipta Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submiising (OSS), 24 September 2020, Nomor Pencatatan 000205341
12. Hak Cipta Buku Buku Acara & Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara Modul 1, 18 Maret 2021, Nomor Pencatatan 000242954
13. Hak Cipta Buku Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur, 13 Maret 2021, Nomor Pencatatan 000242993.

Orasi Ilmiah

Rapat Senat Terbuka Yudisium Studi Ilmu Hukum Angkatan IV Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2015/2016, Selasa 22 Maret 2016, judul *Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pertambangan Batubara*.

Buku

a. Buku Referensi

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan, 2010.
2. Perca Anotasi: Esai Perempuan Kalimantan, 2010.
3. Duh...Ruas-Ruas Hukum Kehutanan, 2014.
4. Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat; Sebuah Gagasan Dari Permasalahan Pertambangan Batubara, 2017.
5. Duh.....,Ruas-Ruas Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, 2017
6. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Pertama), 2017.
7. *Introduction to Environmental Law*, 2017, USA.
8. Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi: Dalam Baku Mutu Lingkungan Hidup Lain Sesuai dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2018.
9. Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, 2018.
10. Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, 2018.
11. Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, 2018.
12. Kontruksi Hukum Adminitrasi Pemerintahan, Membedah UU No.30 Tahun 2014, terbit 2019.
13. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Kedua), 2019.

14. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Ketiga), 2019,
15. Hukum Perkebunan Indonesia, 2019.
16. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Keempat), 2020.
17. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Kelima), 2020.
18. *Internasional Legal Perspective of Environmental Law (At A Glance)*, 2020.
19. Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2020.
20. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Pertama), 2021.
21. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Kedua), 2021.
22. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Ketiga), 2021.
23. Kumpulan Kitab Hukum *Nederlandsch: Burgelijke Wetboek (KUHPerdata), Wetboek Handling (KUHD), HIR-KUHEPERDATA*, Rbg, RV, KUHP, KUHP, 2021.
24. Sistem Perizinan Dan Non Perizinan Di Kalimantan Timur, 2021.

25. Menelisik Pengawasan Bersama Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, 2021.

b. Buku Chapter

1. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Pertama), 2021.
2. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Kedua), 2021.
3. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Ketiga), 2021.

c. Buku Ajar

1. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, 2017
2. Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, 2017.
3. Buku ajar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 2017.
4. Buku Ajar Kehutanan, 2019.
5. Buku Ajar Perizinan Dalam *Online Single Submitting* (OSS), 2020.
6. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, 2020.
7. Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Edisi Revisi, 2021.
8. Buku Ajar Hukum Perkebunan, 2021.
9. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, 2021.

d. Diktat

1. Diktat Ilmu Negara, 2010.
2. Diktat Pidana Lingkungan, 2010.
3. Diktat Hukum Kesehatan Lingkungan, 2011.
4. Diktat Penataan Ruang, Edisi 1, 2011
5. Diktat Hukum Perlindungan dan Penegakan Lingkungan Hidup, 2011.
6. Diktat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, 2015.
7. Diktat Hukum Adat, 2020.

e. Modul

1. Hukum Acara & Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara, Modul 1, 2020.
2. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik (*Online*), 2020.
3. Modul Hukum Adat, 2022.
4. Modul Pengantar Hukum Indonesia, 2022.

Publikasi Koran/Majalah/Media Online

1. Kaltim Post, Sabtu 26 Maret 2011, *Mengenal Dosen Fakultas Hukum Siti Kotijah, Kenalkan kaltim lewat Blog, celoteh (inspirasi perempuan);*
2. Samarinda Pos, Rabu Maret 2011 *Unmul Siap Bantu atasi kekurangan fasilitas DKP,*

3. Koran Kaltim, senin 24 januari 2011, *Pengambil kebijakan bisa dipidanakan*
4. Tribun Kaltim, 21 April 2011 *Sanksi Adminitrasi terhadap perusahaan lingkungan di Samarinda*
5. Samarinda Post, Jumat 15 April, *Satu koin Untuk Atasi Sampah*
6. Kaltim Post, Jumat 15 April 2011, *Mahasiswa yang kumpulkan koin untuk membeli kointainer sampah, Pribatin karena berserakan di dalam kota.*
7. Tribun Kaltim, Jumat 15 April 2011, *sumbang 1 koin untuk samarinda, mahasiswa fakultas bukum unmul louching “koin container* Tribun Kaltim, Senin 18 April 2011, *Pemkot Tak Merasa Tersinggung; baru terkumpul Rp. 1 juta.*
8. Majalah Online www.kanaliforamasi.com, RTRW Kaltim *penuh kepentingan*, Jakarta
9. Majalah Bongkar Kaltim, 2 Juni 2011, *Jaminan Reklamasi tambang di Kota Samarinda.*
10. Majalah BORNEO (barometer Magazine), Jaminan Reklamasi, Edisi 02. 1 november 2011, ISSN 0772088653997.
11. Majalah Bongkar Kaltim, *Pertambangan di Kota Samarinda*, 8 Agustus 2011.
12. Kaltim post, Kota samarinda layak sebagai kota tambang, 10 september 2011.
13. Kaltim Post, *Alih fungsi lahan pertanian untuk pertambangan*, 22 oktober 2011.

Artikel

Yang dimuat Media Online Gagasanhukum.Wordpress.com,
ISSN 19799373.

2008

- 1) *Aspek Hukum Hak Masyarakat Sekitar Hutan*, 7 April 2008
- 2) *Keadilan dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*, 9 April 2008
- 3) *Konsumen Terjebak Iklan Tarif Seluler*, 30 April 2008
- 4) *Hak Masyarakat Adat Kaltim*, 7 Mei 2008
- 5) *Memahami Filosofi PP No. 2 Tahun 2008*, 22 Mei 2008
- 6) *Bisnis Alib Fungsi Hutan Lindung*, 14 Mei 2008
- 7) *PP No. 2 Tahun 2008 Jangan Dipakai Hancurkan Hutan*, 29 Mei 2008
- 8) *Oligarki Penebangan Liar*, 5 Juni 2008
- 9) *Dimensi Penebangan Liar*, 12 Juni 2008
- 10) *Proyek CPO dan Kebancuran Hutan*, 20 Juni 2008
- 11) *Bencana Pertambangan di Kawasan Hutan Lindung*, 26 Juni 2008
- 12) *Eferio Proyek Perkebunan Kelapa Sawit*, 3 Juli 2008
- 13) *Mencegah Potensi Konflik Kewenangan Pengelolaan Perikanan*, 10 Juli 2008
- 14) *Pembalakan Liar Sulit di Pidana?*, 17 Juli 2008
- 15) *Tipologi Cukong Pembalakan Liar*, 24 Juli 2008
- 16) *Tipologi Korupsi Pembalakan Liar*, 31 Juli 2008

- 17) *Kelemahan UU Kehutanan*, 7 Agustus 2008
- 18) *Menggugat Corporate Social Responsibility*, 14 Agustus 2008
- 19) *Kerusakan Lingkungan dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, 21 Agustus 2008
- 20) *Konsep Berkelanjutan dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, 28 Agustus 2008
- 21) *Memaknai perubahan PP No.6 Tahun 2007*, 4 September 2008
- 22) *Kawasan Hutan Lindung Pasca Terbitnya PP No.3 Tahun 2008*, 11 September 2008
- 23) *Hilangnya Megadiversity*, 18 September 2008
- 24) *Bencana Ekologi*, 25 September 2008
- 25) *Moratorium Logging*, 2 Oktober 2008
- 26) *Carbong Trading*, 9 Oktober 2008
- 27) *Esensi Lingkungan*, 13 Oktober 2008
- 28) *Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, 23 Oktober 2008
- 29) *Mala Administrasi dan Pembalakan Liar*, 30 Oktober 2008
- 30) *Pembalakan Liar dan Pembuktian Terbalik*, 6 November 2008
- 31) *Konsep Kerusakan Hutan*, 13 November 2008
- 32) *Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, 20 November 2008
- 33) *Penyalagunaan Wewenang dan Cacat Prosudur*, 27 November 2008
- 34) *Menggugat Hak Rakyat Atas Lingkungan*, 4 Desember 2008
- 35) *Mediasi Sengketa Lingkungan*, 1 Desember 2008

- 36) *Penataan Ruang dan Pengelolaan Hutan Lindung*, 18 Desember 2008
- 37) *Hukum Kebutuhan Administrasi*, 25 Desember 2008.

2009

- 38) *Konsep Hutan dan Hukum Kebutuhan*, 1 Januari 2009
- 39) *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Hutan*, 8 Januari 2009
- 40) *Perijinan Dalam Kawasan Hutan Lindung (bagian I)*, 15 Januari 2009
- 41) *Perijinan Dalam Kawasan Hutan Lindung (bagian II)*, 22 Januari 2009
- 42) *Perijinan Dalam Kawasan Hutan Lindung (bagian III)*, 29 Januari 2009
- 43) *Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Daerah*, 5 Februari 2009
- 44) *Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air*, 12 Februari 2009
- 45) *Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan*, 19 Februari 2009
- 46) *Prinsip Kesra dan Sumber Daya Hutan*, 26 Februari 2009
- 47) *Tindak Pidana Korporasi*, 5 Maret 2009
- 48) *UU No.19 Tahun 2004 dan Bencana Lingkungan*, 12 Maret 2009
- 49) *Hukum Lingkungan dan Pemanasan Global* 19 Maret 2009
- 50) *Nilai-nilai Konservasi Sumber Daya Alam*, 26 Maret 2009
- 51) *Konsep Hukum Pengelolaan Pesisir*, 2 April 2009
- 52) *Prinsip-prinsip Kebutuhan*, 9 April 2009

- 53) *Sistem Perijinan Lingkungan Daerah*, 16 April 2009
- 54) *Pengaturan Internasional Bidang Kebutuhan*, 23 April 2009
- 55) *Konservasi sumber daya hutan*, 30 April 2009
- 56) *Pengelolaan kawasan hutan wilayah perbatasan*, 7 Mei 2009
- 57) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*, 14 Mei 2009
- 58) *Good governance dan Lingkungan Hidup*, 21 Mei 2009
- 59) *Investasi dan Lingkungan*, 28 Mei 2009
- 60) *Ekolabeling*, 4 Juni 2009
- 61) *Perubahan Iklim*, 11 Juni 2009
- 62) *Fungsi Ekologi*, 18 Juni 2009
- 63) *Penggunaan Kawasan Hutan*, 25 Juni 2009
- 64) *Mengugat Penegakan Hukum Lingkungan*, 2 Juli 2009
- 65) *Memaknai Samarinda Sebagai Kota Tambang*, 9 Juli 2009
- 66) *Nasib Hutan Kaltim*, 16 Juli 2009
- 67) *Emas Hitam dari Sanggata Kaltim*, 23 Juli 2009
- 68) *Pembangunan Berkelanjutan*, 30 Juli 2009
- 69) *Bahan Obat di Kalimantan*, 6 Agustus 2009
- 70) *Hutan Kemasyarakatan* 13 Agustus 2009
- 71) *Eksistensi Hak Masyarakat Sekitar Hutan*, 20 Agustus 2009
- 72) *Menyikapi Putusan Bebas Pelaku Illegal logging*, 27 Agustus 2009
- 73) *Isu Lingkungan*, 3 September 2009
- 74) *Perlindungan HKI Pada Obat Tradisional*, 10 September 2009
- 75) *Perijinan dan Ilegal logging*, 17 September 2009
- 76) *Nasib Orang Utan Kalimantan*, 1 Oktober 2009
- 77) *Pembangunan Perbatasan Kaltim*, 15 Oktober 2009
- 78) *Ekologi dan Pembangunan*, 2 November 2009

- 79) *Ekologi Tradisional Dayak Tunjung Di Kutai Barat*, 12 November 2009
- 80) *Analisis Filosofis UU No.32 Tahun 2009*, 19 November 2009
- 81) *Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Sungai Wain*, 26 November 2009
- 82) *Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, 3 Desember 2009
- 83) *Hutan Kemasyarakatan di Kaltim*, 10 Desember 2009
- 84) *Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*, 17 Desember 2009
- 85) *Hutan Kemasyarakatan di Kutai Barat*, 24 Desember 2009
- 86) *Prinsip Keanekaragamahayati Pada UU No.32 Tahun 2009*, 31 Desember 2009.

2010

- 87) *Labirnya LBH Kaltim Versus Kasus Lingkungan Hidup*, 7 Januari 2010
- 88) *Pendidikan Lingkungan Hidup*, 14 Januari 2010
- 89) *Sosologis Pengelolaan Hutan*, 21 Januari 2010
- 90) *Politik dan Kebijakan Kebutuhan*, 28 Januari 2010
- 91) *Negeriku sayang, negeriku malang*, 4 Februari 2010
- 92) *Anggrek Hitam dari Kutai Barat*, 11 Februari 2010
- 93) *Pengembangan kawasan perbatasan di Kalimantan Timur*, 18 Februari 2010
- 94) *Nasib Hutan dibukit Soebarto*, 25 Februari 2010
- 95) *Kampanye Lingkungan Hidup*, 4 Maret 2010
- 96) *Hari Perempuan dan Tambang Di Kaltim*, 11 Maret 2010

- 97) *Banjir Kap Batubara Kaltim*, 18 Maret 2010
- 98) *Sekuritay Dan Perubahan Iklim*, 25 maret 2010
- 99) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia*
1, 1 Apri
- 100) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia*
2, 8 Apri 2010
- 101) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia*
3, 15 Apri
- 102) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia*4,
22, Apri
- 103) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia*
5, 31 Apri 2010
- 104) *Dilema Emas Hitam Kaltim*, 5 Mei 2010,
- 105) *Pembangunan Kota Tarakan Dengan Konsep Hijau*, 13 Mei
2010
- 106) *Protocol Kyoto*, 20 mei 2010
- 107) *Hari Biodiversity, Selamatkan Keanekaragaman Hayati*
Kaltim, 27 Mei 2010
- 108) *Nasib Keanekaragaman Hayati di Kaltim*, 3 Juni 2010
- 109) *Fungsi Publik Lingkungan*, 10 Juni 2010.
- 110) *Konsep Ekonomi Berwawasan Lingkungan*, 17 Juni, 2010
- 111) *Implikasi Perda No.2 Tahun 2001 di Kabupaten Kukar*, 24
Juni 2010
- 112) *Transparasi Pertambangan Pada penpres No. Tahun 2010*, 1
Juli 2010
- 113) *Hak Menguasai Sumber Daya Alam DI Kaltim*, 9 Juli 2010
- 114) *Mentraspormasi Pengelolaan SDA Kaltim*, 15 Juli 2010
- 115) *Pasar Karbon REDD*, 22 Juli 2010

- 116) *Kolonialisasi pertambangan dikaltim*, 29 Juli 2010
- 117) *Hap Hip Pesta Emas Hitam, Menuai Bencana Di Kaltim*, 5 Agustus 2010
- 118) *Kenapa Balikpapan Bebas Ijin Emas Hitam*, 12 Agustus 2010
- 119) *Kaltim Tergadai Atas Nama Izin*, 19 Agustus 2010
- 120) *Konsep Perlindungan Masyarakat Adat*, 25 Agustus 2010
- 121) *Kenapa Penataan Ruang Pulau Terpencil Terabaikan 1*, 3 September 2010
- 122) *Kenapa Penataan Ruang Pulau Terkecil Terabaikan II*, 9 September 2010
- 123) *Environmental Accounting*, 16 September 2010
- 124) *Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Kaltim*, 30 September 2010
- 125) *Pengelolaan Perbatasan Kaltim*, 14 Oktober 2010
- 126) *Perkebunan Kelapa Sawit, Siapa Yang diuntungkan Di Kaltim*, 21 oktober 2010
- 127) *Mencermati Izin Pertambangan Batubara Di Kabupaten Berau*, 28 Oktober 2010
- 128) *Banjir dan Janji Wali Kota Samarinda*, 4 November 2010
- 129) *Wisata Tambang di Kaltim*, 11 November 2010
- 130) *Pengukuban Hak Masyarakat Asli Terhadap Penguasaan SDA Di Katim*, 18 November
- 131) *Ekoregion, Menata Baru Isu Lingkungan Secara Intergal*, 25 November 2010, Media online gagasanhukum.wordpress.com, ISSN 1979-9373;

- 132) *Nasib Wilayah Kepulauan Terluar Di Bulungan Kaltim*, 2 Desember 2010
- 133) *Legal Oponi Kajian Yuridis UU NO.32 Tahun 2009 Tentang PPLH, terhadap Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Cagar Alam Adang Di Paser oleh PT Kedeco Jaya Agung*, 9 Desember 2010
- 134) *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 16 Desember 2010
- 135) *Pengaturan Sanksi Adminitrasi Di UU No.32 Tahun 2009 Dalam Pembuatan Amdal Untuk Usaha Pertambangan*, 23 Desember 2010
- 136) *Jeda Izin Tambang Dalam Gerakan Sebuah Harapan dan Aktualisasinya*; 23 Desember 2010,

2011

- 137) *RTRWP Kaltim, Pesta Konversi Hutan*, 7 Januari 2011
- 138) *Bencana Perubahan Iklim*, 14 Januari 2011
- 139) *Menyikapi Naskah Akademik RUU Kohati*, 20 Januari 2011
- 140) *Kartel Bisnis Pertambangan Kaltim*, 27 Januari 2011
- 141) *Harmonisasi Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam Kaltim*, 11 Januari 2011
- 142) *Desain Penataan Ruang dan Pengembangan Pemekaran Ddaerah Kaltim*, 24 february 2011
- 143) *Kawasan Lindung Samarinda*, 7 Maret 2011,
- 144) *Sanksi Adminitrasi Pertambangan Batu Bara Di Samarinda*, 14 Maret 2011
- 145) *Revisi RTRW Kaltim Penuh Kkepentingan*, 21 maret 2011

- 146) *Menbut, Tambang dan Samarinda*, 28 Maret 2011
- 147) *Jamreke Kriminalisasi Pertambangan Di Kota Samarinda*, 5 April 2011
- 148) *Satu Koin Untuk Kebersihan Kota Samarinda*, 13 April, 2011
- 149) *Kebersamaan Untuk Menciptakan Samarinda Bersih*, 24 April
- 150) *Membangun Kerjasama Warga Negara. Pemeirntah, Dan Perusahaan-Perusahaan Dalam Mengatasi Masalah Keebrsihan Kota Samarinda*, 30 April 2011
- 151) *Legal Opini, Rencana Proyek Miang Besar Coal Termina (MBCT) di Kabupaten Kutim*, 7 Mei 2011
- 152) *Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Dipulau Terkecil* 7 Juni 2011
- 153) *Pemetaan Kuasa Pertambangan Di Kaltim*, 14 Juni 2011
- 154) *Mengungat Pengbargaan Proper Di Kaltim*, 21 Juni 2011
- 155) *Samarinda dikepung Batubara*. 1 Juli 2011
- 156) *Filosofi Uu No.4 Tahun 2011 Tentang Informasi Goespersia*, 7 juli 2011
- 157) *Korban Di Bekas Tambang Batubara Di Kota Samarinda*, 14 Juli
- 158) *Perlunya Tata Kelola Pertambangan*, 28 Juli 2011
- 159) *Mempidanakan Pejabat Dalam IUP Bencana Lingkungan*, 5 Agustus 2011
- 160) *Rencana Perda Hoauling*, 15 Agustus 2011
- 161) *Catatan Buram Pengelolaan Sumber Daya Kaltim*, 25 Agustus 2011

- 162) *Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009*, Bagian 1, 22 September
- 163) *Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009*, Bagian 2, 29 September
- 164) *Sanksi Tindak Pidana Bada Rekayasa Genetika*, 5 Oktober 2011
- 165) *Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (1)*, 27 Oktober 2011
- 166) *Tata Kelola SDA Kaltim dalam Hubungan Antar Bangsa (II)*, 3 November 2011
- 167) *Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (Bagian III)*, 10 November 2011
- 168) *Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian I)*, Diterbitkan 17 November 2011
- 169) *Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian II)* 24 November 2011
- 170) *Implikasi Otonomi Daerah terhadap Penguasaan SDA Kalimantan Timur*, 1 Desember 2011.

2012

- 171) Banjir Lumpur Tambang Batubara Di Palaran Samarinda
- 172) Kewajiban Pemkot Dan Peran Masyarakat Samarinda.
- 173) Gerakan Masyarakat Samarinda Menggugat Dampak Tambang
- 174) Penerapan Pidana Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda
- 175) Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup Di Samarinda

- 176) BLH Kota Samarinda Dan Kerusakan Lingkungan
- 177) Izin Lingkungan Dan Sanksi Administrasi
- 178) Mengkritisi Kebijakan Pertambangan Kaltim
- 179) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian I)
- 180) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian II)
- 181) Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Bidang Pertambangan
- 182) Industri Briket Batubara Kota Samarinda
- 183) Kegagalan Manajemen Energi
- 184) Mengkritisi Penggunaan Bbm Non Subsidi
- 185) Makna Ktt Bumi Rio+20 Bagi Kaltim
- 186) Unsur Kelalaian Lima Bocah Di Sumur Bekas Tambang
- 187) Pentingnya Konferensi Rio+20
- 188) Mengkritisi Revisi Perda Rtrw Balikpapan
- 189) Kolaborasi Jalan Hauling Di Taman Nasional Bukit Soeharto
- 190) Pengendalian Ekspor Mineral
- 191) Memprediksi Musim Kemarau Dan Nilai Kearifan Lokal
- 192) Belajar Pajak Super Pertambangan Untuk Makmurkan Rakyat
- 193) Membangun Green Religion
- 194) Pertambangan Ramah Lingkungan
- 195) Filosofi Gugatan Masyarakat Dalam UU PPLH

- 196) Akibat Hukum Pencemaran Sungai Sanggata
- 197) Menunggu Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- 198) Tindak Lanjut Langkah Jatam Kaltim

“Setiap detik yang kita miliki, jadikan diri kita manusia yang bermanfaat buat semua di mana pun”. Yang lalu bukan milik kita, dan ke depan belum tentu milik kita. MARI Memberi manfaat dan berdampak pada orang lain. Dalam setiap aktivitas sertakan Tuhan doa Orangtua, dan Suami. DV.

Samarinda, 20 Januari 2022



Agustina Wati, S.H., M.H., dilahirkan di Samarinda, 16 Agustus 1986. Pendidikan SDN 019 Samarinda tahun 1998, SLTPN 7 Samarinda tahun 2001, SMA Tunas Kelapa tahun 2001. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tahun 2008, dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2011. Karir pekerjaan dimulai dari Calon Pegawai Negeri Sipil, 1 Desember 2008 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 1 Oktober 2013 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Jabatan yang diemban saat ini sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Mata Kuliah yang diampu; Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Hukum Perlindungan dan Penegakan Lingkungan, Amdal, Baku Mutu Lingkungan, Hukum Administrasi Lingkungan, Hukum Tata Ruang. Pelatihan yang pernah diikuti: Pelatihan Resolusi Konflik tahun 2014.



Nama : Poppilea Erwinta,S.H.,M.H

Tempat tgl : Balikpapan,17 Juli 1974

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : S-2 fakultas hukum
universitas Brawijaya

Pekerjaan : Dosen Fak.Hukum Univ.

Mulawarman



Nama : Sholihin Bone, S.H.,M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 18 Oktober
1986
Agama : Islam
Alamat : Jl. Otto Iskadardinata, RT 30,
Gg. Haji Masratu No 35
Kel. Sungai Dama, kec.
Samarinda Ilir, Samarinda.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

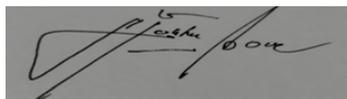
RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Lembaga Pendidikan	Tempat	Tahun Lulus	Keterangan
1.	Universitas Hasanuddin	Makassar	2009	S1
2.	Universitas Hasanuddin	Makassar	2014	S2
3.	-	-	-	-

RIWAYAT PENELITIAN

1. Kajian peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Geo Spasial Kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur Dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman Tahun 2019
2. Kajian Akademik Penataan Wewenang Dan Tugas MPR Dalam Sistem ke Tata negaraan Indonesia Tahun 2019
3. Kajian Penataan Kewenangan Komnasham : Telaah Sistem Hukum Tahun 2021
4. Urgensi Statuta Roma 1998 Terhadap Konflik Israel dan Palestina

Samarinda, 19 Juni 2021



Sholihin Bone, S.H.,M.H.

MODUL HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Modul mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini, merupakan pedoman bagi mahasiswa semester awal (semester 2), sebagai mata kuliah lanjutan dari proses belajar setelah lulus PHI dan PIH di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Modul ini, secara substansi berisi rincian/tahapan perkuliahan Hukum Administrasi Negara yang diberikan selama semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pada setiap pertemuan, modul ini akan disampaikan sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk belajar lebih awal sebelum proses pembelajaran dimulai.

Metode dalam modul Hukum Administrasi Negara ini dengan cara *One Way*, dan sebagian diberikan dengan metode *Problem Based Learning* yang terjadwal. Fungsi Modul ini untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari keseluruhan isi substansi dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara, sehingga harapannya mahasiswa membaca keseluruhan modul ini secara seksama.

Modul ini meliputi:

1. Modul 1 Dan 2 Konsep Negara Hukum
2. Modul 3 Dan 4 Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara
3. Modul 5 Dan 6 Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan
4. Modul 7 Dan 8 Tindakan Pemerintahan
5. Modul 9 Dan 10 Instrumen Pemerintahan
6. Modul 11 Dan 12 Diskresi Pemerintahan
7. Modul 13 Dan 14 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
8. Modul 15 Ujian Tengah Semester
9. Modul 16 Dan 17 Aparatur Sipil Negara
10. Modul 18 Dan 19 Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
11. Modul 20 Dan 21 Keputusan Pemerintahan
12. Modul 22 Dan 23 Maladministrasi
13. Modul 24 Dan 25 Pengawasan
14. Modul 26 Dan 27 Upaya Administrasi
15. Modul 28 Dan 29 Sanksi Administrasi
16. Modul 30 Ujian Semester



 Pustaka Ilmu
 @pustakailmubook
 pustakailmu.co.id

